

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi Indonesia kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun secara daerah. Kelapa sawit menjadi instrumen kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Pertumbuhan ekonomi kelapa sawit sudah menarik pertumbuhan 10 sektor ekonomi lainnya yaitu sektor; (1) pelayanan, (2) perdagangan dan restoran, (3) industri kimia, (4) pupuk dan pestisida, (5) minyak dan gas, (6) industri pertambangan, (7) transportasi, (8) infrastruktur, (9) industri makanan, (10) sektor lainnya (Sipayung 3013).

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah maka provinsi yang memiliki areal kelapa sawit yang luas menghasilkan GDP yang lebih tinggi daripada provinsi dengan areal tanaman sawitnya lebih sedikit, bahkan jauh lebih tinggi daripada daerah yang tidak ada areal perkebunan kelapa sawit. Demikian pula isu ketimpangan sosial, provinsi yang memiliki areal kelapa sawit yang lebih luas menunjukkan tingkat ketimpangan sosial yang lebih rendah daripada provinsi yang areal sawitnya sedikit (Zen et. al, 2018). Dengan kata lain rata-rata tingkat kemiskinan berdasarkan angka statistik cenderung lebih rendah pada daerah dimana ada pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Dari sisi sosial ekonomi, industri kelapa sawit Indonesia berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di perdesaan terutama desa-desa diluar Jawa. Pada tahun 1997 pendapatan bersih petani kecil meningkat rata-rata 7 kali lebih tinggi daripada petani kecil tanaman pangan (World Growth, 2011). Produksi kelapa sawit memberikan pendapatan

yang memadai bagi jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Sehingga penanaman kelapa sawit meningkatkan penyerapan tenaga kerja, diperkirakan pada tahun 2020 dapat mengentaskan kemiskinan sebesar 6 juta keluarga miskin (World Growth 2011).

Pada pusat-pusat pertumbuhan kelapa sawit di Provinsi-Provinsi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik seperti di Sumatra Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur karena berkembangnya kelapa sawit. Di provinsi-provinsi tersebut PDRB lebih tinggi daripada di provinsi-provinsi lain (Table 4.5). Sebagai contoh di provinsi Riau dalam lima tahun (2009-2013) terjadi penurunan angka kemiskinan dari 21% menjadi 10% (Sirayung, 2014). Kontribusi kelapa sawit di Jambi terhadap PDRB sebesar 12%. Jadi kelapa sawit sangat berkontribusi terhadap perekonomian daerah mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.

Seperti ditunjukkan data statistik, kemiskinan di Indonesia sebagian besar terjadi di pedesaan. Kemiskinan di sental produksi kelapa sawit, petani-petani sawit yang hidup dibawah garis kemiskinan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Sekitar 16,4% penduduk perkotaan hidup dibawah garis kemiskinan lebih tinggi dibanding penduduk dipedesaan sebesar 13,2%. Indeks kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan juga lebih rendah daripada desa-desa yang tidak menanam kelapa sawit (Tabel 4.6). World growth (2009) mencatat dalam dekade yang lalu, perluasan kelapa sawit merupakan sumber signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di pedesaan Indonesia.

Tabel 1.1. Perbandingan Antar Propinsi Berdasarkan PDRB dan Tingkat Kemiskinan

Propinsi	PDRB (milyar Rupiah)		Areal perkebunan rakyat (Ha)		Kemiskinan dipedesaan (%)	
	2008	2013	2008	2013	2008	2013
Riau	149,125	340,631	845,232	1,362,769	12.90	9.55
Jambi	31,271	73,846	316,480	445,650	7.81	7.54
Sumatera utara	212,145	401,383	379,864	430,600	13.63	10.33
Sumatera Selatan	89,101	180,430	295,837	401,795	18.43	14.50
Kalimantan Barat	49,133	84,956	198,879	332,983	13.47	10.07
Kalimantan Timur	134,228	283,532	84,621	239,056	16.98	10.24
Benkulu	14,916	27,388	141,283	210,589	21.66	17.97
Rata-rata pada Propinsi dominan Sawit	97,131	198,881	323,171	489,063	14.98	11.46
Aceh	54,210	89,109	113,735	201,489	29.87	20.14
Sumatera Barat	70,955	127,100	153,754	190,935	13.01	8.30
Kalimantan Tengah	32,760	63,515	92,716	181,136	10.76	6.45
Lampung	72,261	162,491	77,361	93,699	23.70	15.62
Kalimantan Selatan	45,205	82,649	49,291	90,344	7.72	5.50
Sulawesi Tengah	20,053	57,734	6,064	62,377	24.97	15.89
Pulau Bangka Belitung	20,846	38,226	24,599	60,567	10.87	6.97
Sulawesi Barat	8,297	16,184	40,440	48,574	20.29	13.31
Rata-rata pada propinsi yang sedikit areal sawit	40,573	79,626	69,745	116,146	17.65	11.52

Sumber: BPS Indonesia (diproses oleh penulis).

Catatan: Propinsi-propinsi di rangking berdasarkan areal perkebunan rakyat tahun 2013.

Tabel 1.2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Berdasarkan Provinsi

Propinsi	Indeks Kedalaman Kemiskinan			Indeks Keparahan Kemiskinan		
	Urban	Pedesaan	Urban + Pedesaan	Urban	Pedesaan	Urban + Pedesaan
Riau	2.02	2.35	2.18	0.68	0.67	0.68
Sumatera Utara	2.34	2.01	2.17	0.61	0.51	0.55
Kalimantan Tengah	0.98	2.04	1.68	0.38	0.57	0.51
Sumatera Selatan	4.92	3.16	3.84	1.63	0.83	1.14
Kalimantan Barat	2	1.7	1.79	0.49	0.38	0.41
Kalimantan Timur	1.17	2.86	1.81	0.28	0.76	0.46

Propinsi	Indeks Kedalaman Kemiskinan			Indeks Keparahan Kemiskinan		
	Urban	Pedesaan	Urban + Pedesaan	Urban	Pedesaan	Urban + Pedesaan
Jambi	3.08	1.31	1.88	0.98	0.32	0.54
Kalimantan Selatan	0.7	0.89	0.81	0.14	0.18	0.16
Aceh	3.86	6.04	5.41	1.25	1.81	1.64
Sumatera Barat	1.35	2.1	1.84	0.3	0.52	0.44
Bengkulu	4.45	3.81	4.03	1.15	0.92	1
Pulau Bangka Belitung	1.25	2.08	1.68	0.32	0.6	0.47
Lampung	3.23	4.2	3.94	0.93	1.12	1.07
Sulawesi Tengah	2.14	5.08	4.46	0.56	1.6	1.38
Sulawesi Barat	1.73	3.02	2.59	0.4	0.66	0.57

Sumber: BPS Indonesia (diproses oleh penulis).

Penanaman kelapa sawit berkembang sangat pesat dalam tiga dekade terakhir, peningkatan luas areal kelapa sawit dari 294,6 ribu ha pada tahun 1980 menjadi 8,9 juta ha di tahun 2011 atau tumbuh 30 kali lipat. Penyebaran areal kelapa sawit sebagian besar berada di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Provinsi penghasil utama minyak sawit berada di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Berdasarkan statistik, tren areal kelapa sawit akan terus tumbuh menjadi 13,67 juta ha hingga 2020 (Zen et. al, 2018). Bilamana tidak ada kebijakan negara untuk mengendalikan, maka perluasan tanaman sawit akan terus merengsek dan merambah hutan konservasi yang sudah kritis adanya, konversi lahan gambut dan konversi areal tanaman lain menjadi tanaman sawit akan berlanjut (Zen et. al 2015).

Hutan-hutan yang baik untuk perlindungan dari bencana lingkungan telah dirusak begitu parah diberbagai provinsi yang luas areal kelapa sawitnya (Zen et al 2015). Program pemerintah melindungi hutan sudah sejak lama dilakukan, namun kurang efektif karena perambahan yang begitu masif oleh masyarakat yang secara sosial ekonomi pada kategori

miskin. Perkembangan perluasan perkebunan khususnya kelapa sawit terus merangsek ke hutan konservasi Kabupaten-Kabupaten lain di Indonesia, deforestasi juga sangat pesat terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Zen 2018).

Sayangnya produktivitas sawit di Tapanuli Selatan sangat rendah dibandingkan dengan perkebunan rakyat yang sudah mendapat pembinaan seperti petani independen yang sudah maju seperti di Kabupaten Labuhan Batu dan Simalungun (lihat Bab IV). Rendahnya produktivitas petani karena lebih bersifat ekstensif daripada budidaya intensif, petani lebih suka menambah areal baru dengan membuka hutan, hal inilah penyebab penyusutan hutan konservasi yang ada di Tapsel (Zen 2018).

Lembaga internasional, seperti Conservation International (CI) dengan program *Sustainable Landscape Program* (SLP) telah mendukung pemerintah daerah Tapsel sejak 2014 dengan program *smart land uses planning*, meningkatkan manajemen hutan, pertanian berkelanjutan komoditi sawit rakyat (CI 2015), namun karena pendekatannya penekanannya konservasi hutan, kurang fokus pada aspek ekonomi petani sawit tradisional, maka dirasakan kurang dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga kurang efektif mengubah perilaku petani membuka lahan baru (ekstensifikasi). Budaya petani tradisional yang tidak dilakukan oleh Perusahaan perkebunan adalah tumpang sari atau tanaman sela (*intercropping*) sebelum sawit menghasilkan. Model tumpang sari ini sudah lama dilakukan penelitian oleh PPKS dan cukup menguntungkan petani (Barlow 2006). Perkebunan besar yang membangun pola perkebunan Inti Rakyat (PIR) lebih menyukai tanaman penutup (*cover crop*) daripada tanaman sela (McCarthy and Zen, 2017).

Demikian pula Pemerintah Tapanuli Selatan telah berusaha memperkuat kapasitas dan prosedur penggunaan lahan dan sumber daya dan membuat kebijakan dan peraturan terkait namun pendekatan pemberdayaan ekonomi dirasakan masih kurang, karena bantuan untuk intensifikasi sangatlah terbatas dan bersifat partial seperti hanya memberikan bantuan benih unggul tanpa pembinaan yang meluas diseluruh Kabupaten Tapanul Selatan. Oleh sebab itu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi untuk rakyat perlu ada ana isis ekonomi agar dapat meyakinkan dan memastikan intensifikasi semi intensif dapat meningkatkan ekonomi rakyat karena keterbatasan permodalan petani.

Secara normatif meskipun produktivitas sawit rakyat independen dapat ditingkatkan, tetapi belum tentu bisa meningkatkan pendapatan mereka karena sangat tergantung pada tingkat harga TBS yang diterima. Sudah diketahui secara umum bahwa sebagian besar hasil produksi TBS petani sangat tergantung kepada agen sawit yang bertingkat-tingkat. Itulah salah satu faktor kenapa pendapatan petani relatif rendah.

Pada bulan September 2018 peneliti melakukan observasi lapangan di Tapanuli Selatan yang menguatkan data statistik tentang rendahnya produktivitas perkebunan rakyat independen dan panjangnya mata rantai pemasaran TBS. Harga TBS yang diterima petani independen relatif rendah bila dibandingkan dengan harga TBS pada tingkat parik pengolahan TBS. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan pedagang perantara atau agen-agen TBS sangat berperan besar dalam menyalurkan hasil TBS rakyat, atau dengan perkataan lain sistem pemasaran TBS rakyat terindikasi monopolistik ditingkat desa penghasil sawit.

Dari uraian diatas, maka ide untuk meningkatkan produktivitas dengan intensifikasi berwawasan lingkungan akan mengurangi angka kemiskinan tidaklah cukup, apabila pasar TBS tidak kompetitif karena masalah dalam rantai pasok (*supply change*) tidak diperbaiki. Perkiraan *outcome* dari penerapan konsep ini secara luas akan berdampak positif pada usaha konservasi hutan, karena petani lebih fokus pada intensifikasi daripada membuka lahan baru. Oleh sebab itu penelitian yang lebih mendalam tentang rantai pasok sangatlah penting dilakukan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kajian intensifikasi sawit rakyat tradisional yang lebih bersahabat dengan lingkungan.

Pertimbangan investasi (CBA) untuk intensifikasi sawit rakyat tentu akan sulit dilakukan petani tradisional, tidak akan bisa baik secara teknis maupun pembiayaan dilakukan seperti perusahaan perkebunan. Oleh sebab itu kajian kemungkinan investasi yang lebih moderat (semi intensif) yang mungkin dapat dilakukan petani tradisional perlu dilakukan dalam analisis CBA.

Dari uraian tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok kelapa sawit rakyat di kabupaten Tapanuli Selatan dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Perkembangan luas kelapa sawit rakyat sudah mengancam konservasi hutan yang sudah sangat terbatas arealnya. Walaupun usaha pemerintah dengan berbagai program konservasi sudah ada, tetapi dirasakan masih kurang efektif.
2. Pendekatan konservasi saja dirasa kurang tepat maka diperlukan pendekatan ekonomi bersamaan dengan pendekatan lingkungan hidup, yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pekebun miskin dengan teknologi yang lebih moderat, agar

mereka lebih fokus pada usaha intensifikasi pada lahan usaha tani mereka agar tidak membuka lahan baru. Petani lebih fokus pada intensifikasi daripada ekstensifikasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan intensifikasi ramah lingkungan dapat meningkatkan pendapatan petani perkebunan sawit rakyat.
2. Bagaimana rantai pasok TBS mempengaruhi harga TBS. Apakah selisih harga ditingkat petani dengan ditingkat pabrik PKS terlalu lebar, sehingga terjadi inefisiensi dalam rantai pasok TBS.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis nilai ekonomi investasi kelapa sawit rakyat secara berkelanjutan. Secara spesifik tujuannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah intensifikasi ramah lingkungan dapat meningkatkan pendapatan petani perkebunan rakyat.
2. Menganalisis apakah rantai pasok TBS berpengaruh terhadap harga TBS yang diterima petani dan menganalisis efisiensi rantai pasok TBS.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap tesis ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan peneliti-peneliti lainnya serta sebagai persyaratan kelulusan pada strata dua ilmu ekonomi. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan, khususnya dari sudut pandang ilmu ekonomi dan juga bermanfaat bagi pemerintah Tapanuli Selatan untuk dijadikan bahan referensi kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

